

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN POTENSI PENANGKARAN
PENYU DI PEKON MUARA TEMBULIH KECAMATAN NGAMBUR PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**RENI APRILLIA
NPM : 1721020271**



Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN POTENSI
PENANGKARAN PENYU DIPEKON MUARA TEMBULIH KECAMATAN NGAMBUR
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
RENI APRILLIA
NPM : 1721020271
Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I
Pembimbing II

: Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I
: Anis Sofiana, M.S.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut Fiqh siyasah. keanekaragaman genetik yang terjamin serta dapat membantu kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam terutama hewan yang hampir punah dan membantu melindungi hewan yang hampir punah salah satunya Penyu untuk memberikan wewenang agar masyarakat menjaga dan melindungi Ekosistem Laut Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan penangkaran penyu agar penyu tetap berkembangbiak secara terus menerus. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangka, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah memiliki kearifan lokal yang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan penyu serta menjaga penyu agar tidak punah demi keseimbangan ekosistem. Bentuk karifan ini terdiri dari nilai dan norma dimana ada anjuran dan pantangan serta adanya sanksi apabila dilanggar hal tersebut juga terjadi di pesisir barat. Guna Penangkaran Penyu pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan populasi penyu agar tidak punah dengan meningkatkan daya tahan tubuh penyu dari berbagai gangguan, termasuk penyakit, menjauhkan penyu atau tukik dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya (misal dari predator) dan meningkatkan daya tetas telur penyu.

Berdasarkan Pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran penyu di Pekon Muara Tembulih dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan. Data primer di peroleh langsung dari responden mengenai Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu dipekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut Fiqh Siyasah sedangkan Data sekunder berupa teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi Dan monografi penangkaran. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai kelemahan dalam mengambil kebijakan dan keputusan karena setiap keputusan yang diambil oleh Dinas Kabupaten/Kota memerlukan izin dari Dinas Provinsi. Oleh karena itu dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat memiliki wewenang terbatas dalam mengambil keputusan untuk melestarikan penangkaran penyu yang berda di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Peran pemerintah dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Barat dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu menurut Fiqh Siyasah, peran pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memenuhi ciri-ciri dan hak kewajiban sebagai *Ulil Amri*.

Kata kunci : Peran Dinas Kelautan dan Perikanan, Guna Mempertahankan penangkaran peny

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RENI APRILLIA

Npm : 1721020271

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah dalam Mempertahankan Potensi penangkaran penyu di pekan Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pesisir Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi atau punsaturan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Maret 2021



Reni Aprillia

NPM. 1721020271



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi Skripsi sebagaimana mestinya terhadap

Judul : Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi
Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan
Ngambur Menurut Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat) saudara

Nama : Reni Aprillia

Npm : 1721020271

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi A.S., M.Sos.I

NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan

Frengki, M.Si

NIP. 198003152009011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)** Oleh **Reni Aprillia, NPM 1721020271**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Hari/Tanggal: **Selasa, 15 Juni 2021**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris

Hendriyadi, S.H.I., M.H.

Pembahas Utama

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Pembahas Pendamping I : Dr. Susiadi As., M.sos.I

Pembahas Pendamping II : Anis Sofiana, M.S.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Kedua orangtuaku Bapakku Joni dan Ibuku Rohmatun, yang aku sayangi dan aku banggakan selalu menguatkanmu sepuh jiwa raga, merawatmu, memotivasimu dengan nasehat-nasehat luar biasa, dan mendo'akanmu disetiap langkahmu demi tercapai-Nya cita-citaku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kedua Kakakku Rosa Fitria dan Miftahuddin yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendo'akanmu untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada adikku tersayang Jemi Ricaldo yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada sahabat seperjuangan Ratna ghia Angelia, Eva julia, Aprita sari, Devita sari yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Reni Aprillia putri kedua dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Joni dan Ibu Rohmatun yang lahir di Gedung Cahya Kuningan pada tanggal 12 Mei 1999, Penulis Mempunyai satu kakak perempuan yang bernama Rosa Fitria dan mempunyai adik laki-laki yang bernama Jemi Ricaldo.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu:

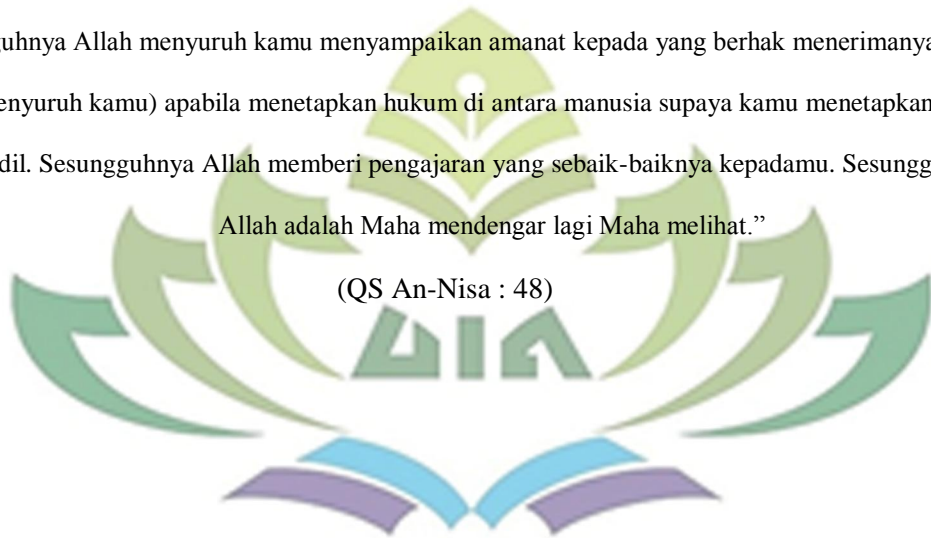
1. Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Cahya Kuningan Ngambur, diselesaikan pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Ngambur, diselesaikan pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negri (MAN) 1Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2017.
4. Mahasiswa di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasahsyar'iyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017.

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS An-Nisa : 48)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,

Peran Pemerintah Dalam Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat) shalawat beserta salam kami semoga tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran Beliau.

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Prodi Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) . dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini , tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak prof. Dr.KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairudin, M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (siyasah Syar'iyah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bapak Dr. Susiadi AS.,M.Sos.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Anis Sofiana, M.,Si selaku pembimbing II yang meluangkan waktu Dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, serta staf karyawan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada perpustakaan daerah provinsi Lampung dan kepada perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literature yang dibutuhkan.
7. Kepada Bapak Mukhlazim S.Pd.,MM selaku sekretaris umum Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
8. Ayah dan ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
9. Saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuandan bimbingan yang telah memberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Amin yarabbal a'lamin.*

Bandar lampung, 8 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | ii |
| i | |
| PENGESAHAN | I |
| v | |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| MOTTO | v |
| i | |
| PERSEMBAHAN | v |
| ii | |
| RIWAYAT | HIDUP |
| iii | |
| KATA | PENGANTAR |
| x | |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Kajian terdahulu yang Relevan | 10 |
| H. Metode penelitian..... | 12 |
| I. Sistematika pembahasan | 19 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah | 21 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah | 21 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah | 25 |
| 3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah | 30 |
| B. Ruang Lingkup Ulil Amri..... | 33 |
| C. Pengertian Penangkaran Penyu..... | 43 |
| 1. Pengertian Penangkaran | 43 |
| 2. Pengertian Penyu dan Jenis-Jenis Penyu | 46 |
| 3. Karakteristik Bio-fisik Tempat peneluran penyu..... | 52 |
| 4. Kemiringan pantai..... | 55 |
| 5. Undang-undang tentang perkembang Biakan penyu | 58 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Kelautan Kabupaten Pesisir Barat..... | 62 |
| 1. Sejarah berdirinya Dinas Kelautan Kabupaten Pesisir Barat | 62 |
| 2. Visi dan Misi dinas Kelautan dan perikanan | 62 |
| 3. Struktur Dinas Kelautan Dan Perikanan..... | 64 |
| B. Penyajian fakta dan data penelitian | 66 |
| 1. Gambaran penangkaran penyu Kabupaten Pesisir Barat | 66 |
| 2. Peran Dinas Kelautan dalam mempertahankan penangkaran penyu..... | 69 |
| 3. Upaya Dinas Kelautan dan masyarakat dalam mempertahankan | 72 |
| 4. Tahap-Tahap Upaya mempertahankan pengelolaan penangkaran penyu | 74 |
| 5. Kegunaan Penangkaran | 77 |
| 6. Faktor pendukung dan Faktor penghambat mempertahankan potensi penangkaran penyu | 77 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur | 78 |
| B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur..... | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Rekomendasi..... | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan karangka awal pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami judul Skripsi ini yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Kelautan Kabupaten Pesisir Barat)** untuk memahami maksud dari penulis dengan judul tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan.

Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹

Pemerintah adalah secara etimologi berasal dari kata “’perintah”’berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan “ pe” menjadi “pemerintah” yaitu badan yang melakukan kekuasaan memerintah, dibeberapa Negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya “Government” dan perancis menyebut ‘Gouvernement” Keduanya berasal dari perkataan latin “Gubernaculum”. Sedangkan belanda menyebutnya sebagai “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan negara yang berwenang. untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051

mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Kementrian.²

Mempertahankan potensi penangkaran penyu adalah Melindungi/ Mempertahankan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah.³

Perspektif adalah Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁴

Fiqh Siyasah Adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam.⁵

Berdasarkan Penjelasan istilah-istilah diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah Apakah Pemerintah berperan penting dalam mempertahankan penangkaran penyu dan bagaimana tinjauan menurut perspektif fiqh siyasah Tentang penangkaran penyu suatu upaya mengkaji secara ilmiah Peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki laut yang mengandung kekayaan flora dan fauna yang beragam. Salah satu fauna laut yang terdapat di Indonesia adalah penyu. Penyu merupakan salah satu fauna yang

²Drs. H. Inu Kencana Syaf'i'e, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5

³Raden ario, "Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan". (Department Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan Dan Kelautan, Universitas Diponegoro, Jurnal Kelautan Tropis Maret 2016), h. 60-66

⁴Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.30

⁵Wahbah-Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2001), h.18

dilindungi karena populasinya yang terancam punah.⁶ dan hampir seluruh masa hidupnya berada dilautan. termasuk binatang ovipar, pembuahan telur berlangsung dalam tubuh induk. dalam memilih pantai untuk tempat bertelur, penyu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan antara lain pasang surut, penutupan vegetasi, lebar dan kemiringan pantai dan tipe pasir. penyu memiliki kemampuan untuk memproduksi telur dalam jumlah yang besar. Dari ratusan butir telur yang dihasilkan, hanya belasan tukik (bayi penyu) yang berhasil sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa.⁷

IUCN telah menyatakan penyu laut masuk dalam daftar merah spesies yang terancam sebagai spesies yang daur hidupnya secara alamiah sudah rentan, kelangsungan populasi penyu laut makin terancam dengan meningkatnya aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup hancurnya habitat dan tempat bersarang penyu, pencurian telur-telurnya, perdagangan illegal produk penyu, dan berbagai eksploitasi yang membahayakan lingkungan. hancurnya habitat penyu akan secara langsung membahayakan kelestarian spesies pemangsa ubur-ubur ini.

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomer 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.⁸

Hal ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya itu dilarang, sedangkan menurut Undang-Undang

⁶Raden ario, ‘*Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan*’. (Department Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan Dan Kelautan, Universitas Diponegoro, Jurnal Kelautan Tropis Maret 2016), h. 60-66

⁷Rina Agustina, ‘*Perubahan Garis Pantai Terhadap Habitat Bertelur Penyu*’. Alumni Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Unpad, Jurnal Perikanan Dan Kelautan

⁸Peraturan Pemerintah, No 7 Tahun 1999, Tentang ‘*Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa*’.

No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu dapat dikenakan hukuman penjara 5 Tahun dan denda Rp 100 juta. Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, Ilmu pengetahuan, penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. Kementerian dalam negeri juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan penyu dengan mengeluarkan surat edaran mendagri Nomor 525.3/5228/SJ/2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang pengelolaan penyu dan habitatnya, yang mengintruksikan kepada para gubernur untuk selanjutnya mengkoordinasikan kepada para bupati dan walikota serta instansi terkait di wilayahnya untuk melindungi penyu melalui tindakan pencegahan, pengawasan, penegakkan hukum dan penindakan serta mensosialisasikan peraturan perundangan terkait, sekaligus pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu.

Kementerian dalam negeri/ dinas kelautan telah memerintahkan masyarakat untuk meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat untuk melestarikan alam dan ikut berperan aktif dalam konservasi penyu agar penyu tetap lestari dan berkembang menjadi banyak maka perlu melestarikan dengan cara berikut.

1. Mengawal dan mengawasi terhadap penerpan UU perlindungan penyu no.77tahun1999.
2. Tidak mengkonsumsi penyu baik daging maupun telurnya.
3. Tidak melakukan pemburuan secara illegal terhadap penyu.

4. Tidak membuang sampah (plastik) dilaut.
5. Tidak mengganggu penyu yang sedang bertelur
6. Konservasi penyu.

Melakukan konservasi dengan penangkaran secara exsitu maupun insitu, patrol pantai penyu, perlindungan sarang, monitoring jumlah species, perlindungan terhadap sarang penyu, selain itu sebagai salah satu bentuk perhatian kita terhadap konservasi penyu. Konservasi penyu adalah dengan mendonasikan dana untuk mendukung kegiatan konservasi. donasi ini dapat disalurkan kepada LSM yang secara aktif melakukan konservasi penyu.⁹

Alqur'an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup telah mewajibkan umat muslim untuk memerhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pelaksanaan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga, melindungi dan memelihara potensi lingkungan laut dan pesisir pantai (Q.S.al-A'raaf, 7:56).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Q.S.al-A'raaf, (7):56

⁹Abdul H Mursalin, "Pengelolaan Penyu Di Indonesia" (On-Line), Tersedia di: <http://www.menlh.go.id/can.conten> dan via artikel (12 Oktober 2020)

Dalam analisis Peran Pemerintah dalam mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dimana harus sesuai dengan hukum ketatanegaraan Islam serta aturan aturan dalam ketatanegaraan Islam sesuai dengan Prodi Siyasah.

Pemerintah Dinas Kelautan sebagian dari al-imamah, hal ini dikaitkan dengan Fiqh al-siyasah al-dusturiyyah yang mengatur tentang hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat nya. Oleh karena itu didalam Fiqh Siyasah dusturiyah juga membahas tentang pengaturan perundang-undangan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menarik untuk penulis mengkaji lagi bagaimana upaya pemerintah dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu di salah satu desa di Provinsi Lampung Kabupaten pesisir barat Kecamatan Ngambur Desa Muara tembulih, dimana ini adalah satu satunya penangkaran penyu yang ada dikabupaten pesisir barat yang kini tidak beroperasi maxsimal sejak tahun 2015 dengan ini penulis merenungkannya dalam sebuah judul skripsi **“Peran Pemerintah dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah.**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

¹⁰ Abd.Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik Dalam Alqur'an* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995), h.63

- a. Kurangnya kebijakan Pemerintah
- b. Konflik hak dan Kewenangan Pemerintah
- c. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan
- d. Kurangnya Fasilitas Penangkaran Penyu

2. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih Focus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi Variabelnya, Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Peran Pemerintah dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Fiyasah terhadap peran pemerintah dalam upaya mempertahankan Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur.

2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur?

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah :

1. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini berharap dapat menyadarkan Pemerintah agar memperdulikan pentingnya mempertahankan Penangkaran Penyu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan system ketatanegaraan di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- c. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan kepustakaan dalam ilmu Hukum Tata Negara Indonesia menurut perspektif Fiqh Siyasah.
- d. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau kepustakaan, khususnya dalam memahami peran Pemerintah dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut fiqh siyasah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Memberikan wawasan pada penulis yang mengangkat judul penulisan tentang peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut fiqh siyasah.
- b. yang sesuai dengan bidang studi yaitu Hukum Tata Negara yang merupakan mata kuliah pokok yang di perdalam dengan pembuatan karya ilmiah ini.

- c. Memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu di pekan muara tembulih kecamatan ngambur menurut perspektif fiqh siyasah.
- d. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu di pekan muara tembulih kecamatan ngambur menurut perspektif fiqh siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan Relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan, kajian penelitian terdahulu yang Relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membuat teori-teori yang Relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil dari kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun ada keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temui, Berikut kajian penelitian terdahulu yang Relevan.

Jurnal tentang “Peran masyarakat dalam menjaga ekosistem penyu di kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan ”Karya Yuri Ariscautri, Surya ningsih, Teguh setiandika igiasi dari Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji.¹¹ dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan dari Skripsi yang peneliti teliti adalah membahas tentang Penyu. dan perbedaannya adalah ini sebuah Peran Masyarakat dalam menjaga Ekosistem Penyu, sedangkan yang peneliti teliti adalah upaya mempertahankan Penangkaran Penyu di pekan Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Menurut Fiqh Siyasah.

Jurnal Tentang Sosialisasi Teknik penangkaran penyu berbasis Ekowisata di pantai gugop Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Karya Rika Astuti dari program Studi Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar.¹² Persamaan dari Skripsi yang peneliti teliti adalah membahas tentang Penyu. dan perbedaannya adalah ini tentang Teknik penangkaran penyu berbasis Ekowisata, sedangkan yang peneliti teliti adalah upaya mempertahankan Penangkaran Penyu di pekan Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Menurut Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang di gunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran data-data.¹³

¹¹ Yuri Ariscuatri, “ *Peran Masyarakat dalam Menjaga Ekosistem Penyu*” (Department Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jurnal Ekosistem Penyu Maret 2017), h. 3

¹² Rika Astuti, “ *Tehnik Penangkaran Penyu Berbasis Ekowisata*” (Studi Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Jurnal Penangkaran Penyu berbasis Ekowisata)

¹³Cholid Norobuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara 1997), h.8

Penelitian di gunakan untuk memecahkan masalah , mengembangkan,, menguji kebenaran, dan menguji pertanggung jawaban. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka membutuhkan system dan cara yang sistematis.

Agar penelitian yang penulis buat ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawaban maka peneliti memerlukan metode penelitian tertentu yang dapat digunakan agar menghasilkan data penelitian yang maksimal dan dapat di pertanggung jawaban , jenis metode penelitian yang di pakai penulis sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata –kata lisan dan perilaku mereka yang di amati. Yang berkaitan dengan proposal yang berjudul peran pemerintah dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu di pekan muara tembulih kecamatan ngambur menurut perspektif fiqh siyasah.¹⁴

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Narasumber yang di wawancara di lapangan. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan

¹⁴Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, h.2

Pemerintah Dinas Kelautan, Aparat pekon muara tembulih dan para pengelola penangkaran penyu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dan jumlah keseluruhan objek yang diteliti.¹⁶ Yang menjadi populasi adalah Dinas kelautan dan perikanan yang berjumlah 12 orang dan pengelola penangkaran peyu berjumlah 6 orang jadi jumlah keseluruhan adalah 18 orang.

b. Sampel

¹⁵Abdurkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Cira Aditya Bakti, 2004), h.115

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 4

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat di anggap mewakili populasi.

Tujuan peneliti mengambil sample adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Tekhnik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dan cirri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi cirri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sample.¹⁷ Oleh karenanya agar sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan penelitian. kriteria yang pantas dijadikan sampel penelitian adalah :

1. Bapak Mukhlazim S.Pd.,M.Pd selaku sekretaris Dinas kelautan dan perikanan
- 2.Ibu Shofiliana, S.Si.MM Selaku Kabid Konservasi dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3.Arif Haryadi, S.Tr.Pi Selaku Pengawas kelautan dan perikanan
- 4.Bapak Wardana selaku Ketua pengelola penangkaran penyu
- 5.Bapak Zabur selaku Wakil Ketua Pengelola Penangkaran Penyu

¹⁷Suharsimi Arikunto,” *Prosedur Penelian suatu pendekatan Praktek*”, Edisi Revisi V, (Jakarta: 2002, Renika Cipta),
h.109

6. Bapak Arzan selaku Bendahara Pengelola Penangkaran Penyu

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah tahapan proses riset dimana penelitian menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini berupa :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara interview yakni teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Disini melakukan wawancara kepada ketua dinas kelautan dan aparatur lainnya.¹⁹

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Ari Kunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leggers. Agenda dan sebagainya. Yang dapat di buktikan berupa bukti foto, video dan sebagainya yang dapat di lihat (disaksikan) para pembaca, sebagai alat bukti kebenaran penelitian.²⁰

5. Metode pengolahan data

¹⁸Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2005), h.11

¹⁹Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.115

²⁰Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h.104

Setelah data terkumpul selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau sudah relvan dengan masalah. dalam hal ini peneliti mengecek kembali data yang di dapatkan melalui studi pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Hal ini di lakukan agar tidak adanya kesalahan dengan yang terjadi di lapangan.dimana proses untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan itu akan di perbaiki pada proses editing ini.²¹
- b. *Sistemating* atau sistematis, yaitu menepatkan data ini pengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.²²

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berpikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, pristiwa-pristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan pristiwa yang umum dan kongkrit itu ditarik kegeneralisasian-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²³

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.125

²²Ibid.,h. 131

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 243

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁴

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai Peran Pemerintah dalam Upaya mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan umum sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori ruang lingkup Fiqh siyasah, ruang lingkup Ulil Amri dan ruang lingkup Penangkaran Penyu.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisikan mengenai deskripsi objek penelitian diantaranya adalah gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian yang meliputi Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur

Bab V Penutup

Bab ini berisikan hasil kesimpulan dari penulis mengenai Peran Pemerintah dalam upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasa

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam “. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu “berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁵ Kata “Faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “Kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), fiqh merupakan “Ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni)

Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *Munakahat* (Perkawinan), *Mawaris* (kewarisan), *mura’at* (hukum acara) *Siyasah*. (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkamal-dauliyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh islam ini akan di uraikan secara lebih perinci.

²⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ”*Kontekstualisasi Doktrin dan politik Islam*”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.2

Berdasarkan gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*Siyaasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuatan.

kebijaksanaan.²⁶Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁷Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. “Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah” mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syari'at meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan

²⁶*Ibid*, h. 3

²⁷Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-syar'iyah*, (kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.4-5.

terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁸ Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad fathi bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat tarik benang merah bahwa Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih biasa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.²⁹

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus. Dengan demikian, fiqh siyasah menepatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat

²⁸ *Ibid*, h. 4

²⁹ *Ibid*.

bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.³⁰

Agama islam, tidak hanya masalah ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.³¹

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh siyasah*, keduanya harus di wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Q.S An-nisa ayat: 58).

Fiqh Siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.³²

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap Ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraannya, bahasa dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah Ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari *Ilmu fiqh*. Selanjutnya, *Hasbi Ash Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasanya Ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara,

³⁰ Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah "Doktrin dan pemikiran politik Islam"*, (Jakarta: PT. Geora Aksara pratama, 2008), h. 10-12

³¹ Hasan Ibrahim Hasan, *sejarah kebudayaan Islam*, (Jakarta: kalam mulia, 2003) cet.1, h. 297-298

³² Ali Syariati, *Ummah Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Aunentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2, h.3

meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, islam dan non islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam Al-mawardi, yang dituangkan didalam karangan fiqh siyasahnya, yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:³³

- a. *Siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha 'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh *siyasah* 8 (delapan):

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik pembuatan Undang-undang)
- b. *Siyasah tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (politik peradilan) *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

³³Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kurub al-Alamiyyah, 2006), 4: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyassah* (Jakarta:GayaMedia Pratama, 2007), h.13

- d. *Siyasah idariyah syar'iyah* (politik Administrasi Negara)
- e. *Siyasah khorijiyah syar'iyyah/siyasah dauliyah* (politik hubungan Internasional)
- f. *Siyasah taufiedziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah tanfidziyahsyar'iyah* (politik peperangan)

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Bidang *fiqh soiyasahdusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah mengenai* peradilan yang sesuai mengenai Administrasi yang sesuai syari'at dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.³⁴

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
 - 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
 - 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
 - 3) Persoalan *ba'at*
 - 4) Persoalan *waliyatul ahli*
 - 5) Persoalan perwakilan
 - 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
 - 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya
- b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah

³⁴ Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. *Fiqh Siyasah: Ajaran sejarah dan pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak. 2014), h.43.

diterapkan imat islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai)³⁵

- 1) Persoalan internasional
 - 2) Territorial
 - 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
 - 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
 - 5) Masalah penyerahan penjahat
 - 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
 - 7) Perwakilan asing, tamu-tamu Negara, orang-orang *dzimmi*
 - 8) Hubungan asing, tamu-tamu Negara, non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.
- c. *Fiqh Siyasah Maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan Negara
- 2) Pengeluaran dan belanja Negara
- 3) *Baitul maal* dan fungsinya³⁶

d. *Fiqh siyasah harbiyah*

³⁵ Muhammad Iqbal, h.251.

³⁶ Suyuthi pulungan, h. 44

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam islam
- 2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawanan perang, *ghanimah* harta peperangan
- 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian³⁷

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldun sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Negara dengan cirri kekuasaan alamiah (*al-mulk at-taba'i*)
- b. Negara dengan cirri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyah*)³⁸

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah*, karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua* Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan

³⁷ *Ibid*, h. 45

³⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum "suatu study tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada periode madinah dan masa kini*, Bogor. Kencana, 2003), Cet. ke-1, h, 13

hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga* Negara ala republic plato (*al-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

e. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Pada penjelasan dari *fiqh* siyasah sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *fiqhSiyasah*, yang mana *Fiqh siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan jugaHadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum islam.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kalam Allah Swt, yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw.Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab dengan makna yang sudah pasti benar.Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca. Seruan Pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu'I-Lah telah menetapkan, bahwasannya di antara manusia ada para Rasul

yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.³⁹

Kemudian taatlah kepada Ulil Amri, yaitu para umara, hakim, ulama perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari Akhir, Sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir dari pada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain dari pada mengikuti Al-Qur'an dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasulnya itu lebih bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh.⁴⁰ Dalam *fiqh siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol social yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.

2) Al-Sunnah

³⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, penerjemah: Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h.119

⁴⁰ *Ibid.*, h. 121

Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *Fiqh siyasah* ada sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal –hal yang datang dari rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.⁴¹

B. Ulil Amri

1. Pengertian Ulil Amri

Ulil amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara sebuah republik, monarki, federasi, persekutuan dan bentuk-bentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara, pemimpin suatu Negara bertugas dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Negara serta mengurus masalah Negara demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Adanya Negara, adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas gelar sukarela.⁴²

Sebagaimana kehidupan masyarakat muslim mengangkat kepala Negara hukumnya wajib, hal itu bertujuan mengatur rakyatnya supaya dapat terbina dengan baik maka dibentuk suatu Negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan maupun sunnah. Memahami makna ulil amri, di kalangan musafir terjadi variasi interpretasi. Ahmad mustapa al-maraghi menyatakan mereka terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin rujukan umat dalam masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Muhammad abduh menjelaskan mereka adalah *al-halli*

⁴¹*kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)* Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, Abdul Wahhab Khallaf 1993), H.47

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*.... h. 1

wa al-aqdi yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, semisal panglima perang, ulama para pemimpin Negara dan tokoh-tokoh bangsa, para pemikir partai, dan para pelopor kemerdekaan.

2. Prinsip-Prinsip Ulil Amri

Didalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bernegara. diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti dibawah ini sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam dan kepemimpinan Negara, sebagai berikut:⁴³

a. Prinsip musyawarah (*Syuro*)

Informasi didalam Al-Qur'an, dalam hal ini pemimpin atau ulil amri diharuskan bermusyawarah sebelum memutuskan segala urusannya. Prinsip musyawarah ini termasuk penentuan Negara. Hal ini terlihat ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan pesan tertentu bagaimana cara menentukan kepala Negara pemerintahan sepeninggal beliau. Ayat Al-Qur'an juga tidak menentukan bentuk pemerintahan. Cara memilih kepala Negara atau pemimpin, dan lain sebagainya. Cuma ada ayat yang menyuruh umat islam mengadakan *syuro*, musyawarah dalam berbagai urusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 159 yaitu:

⁴³ Munawir Szadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta Ulpres, 1993), h.4

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Qs. Al- Imran ayat 159)

Implementasi musyawarah dalam islam diperlukan jelas oleh nabi SAW selaku kepala Negara madinah. Bahkan, nabi telah menjelaskan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.⁴⁴ Praktek musyawarah dilakukan melalui raja dengan meminta pendapat dari pembantu-pembantu dekatnya. Setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat itu, kemudian raja mengambil keputusan. Adapun zaman demokrasi republik yang termasuk dalam Negara islam, musyawarah dilakukan melalui suatu badan perwakilan rakyat, dari pada itu ajaran tentang musyawarah bersifat universal.

a. Prinsip ketataan kepada pemimpin

Merupakan suatu keniscayaan dalam Negara, bagi rakyatnya untuk mentaati penguasa, disini undang-undang politik Islam hanya memerintah setiap warga Negara untuk mentaati penguasa selama masa pemerintahannya tidak melanggar

⁴⁴ Bustanudi Agus *Al-Islam Buku pedoman kuliah untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 134

syariat Islam. Berdasarkan dengan prinsip ini sangat jelas bahwa ketataan kepada pemimpin adalah anjuran dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-nisa ayat 59).

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah. Apapun bentuk pemerintahan itu Allah Swt memerintahkan agar pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan benar, dan apabila seorang pemimpin mengingkari atau dengan kata lain pemimpin tidak berlaku adil maka hukum Allah yang akan member pengajaran. Seseorang harus berlaku adil seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs.Al-Maidah Ayat 8)

Berdasarkan Ayat diatas hendaknya seorang penguasa harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besarhaluan Islam. Sebagaimana yang dikatakan Al-mawardi dalam buku monumentalnya *Al-ahkam as-hulihaniyah* menjelaskan bila seorang penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

c. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan maksudnya setiap individu memiliki hak kebebasan dan kewajiban yang sama dan ini tidak memandang perbedaan aqidah, nasab, dan lain-lain ini terlihat pada suatu ketika seorang wanita tertangkap basah saat mencuri, kemudian para sahabat meminta Nabi menerapkan hukum potong tangan. Tetapi nabi murka dan berkata:

“demi Allah seandainya fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya” (H.R.*Ahmad*).

Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa “kemerdekaan manusia persamaan hak dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan politik. Baru terjamin apabila masyarakat manusia itu sendiri kuat, sehingga sanggup asas-asas yang mulia dan sanggup pula mencegah orang-orang jahat dalam segala caliber dari tindakan memperkosa hak-hak tersebut”.⁴⁵

Ungkapan tersebut diatas nampaknya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ A.Hasyimi, *dimana letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bima Ilmu, 1984), h.220

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujarat Ayat 13)

Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang keharusan seseorang muslimin untuk menjalankan prinsip persamaan dalam luas, tanpa adanya suatu pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun.

d. Prinsip kebebasan beragama

Dalam memandang kebebasan atau kemerdekaan ini islam sangat menjaminnya, sebab kebebasan adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga Negara untuk berpikir, berbuat, berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas fitrahnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾


Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah ayat 256).⁴⁶

⁴⁶ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 juz* (Solo:Qamari PrimaPublister, 2007,h.18

Undang –undang politik islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap warga Negara untuk berpikir, berbuat, berbicara dan berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak dilarang Al-Qur'an dan sunnah sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya. Ini dibuktikan oleh rasul menyalahkan pendapatnya untuk berjihad.

3. Syarat-syarat Ulil Amri atau penguasa

Al-Qur'an dan sunnah, paling sedikit sebelas syarat ulil amri atau penguasa dalam Islam, kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 
- a. Beragama Islam
 - b. Seorang Laki-laki
 - c. Sudah dewasa
 - d. Adil
 - e. Pandai menjaga amanah dan professional
 - f. Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas.
 - g. Seorang warga Negara islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.
 - h. Cinta kebenaran
 - i. Mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
 - j. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat tetapi juga terikat berbagai ajaran dan aturan yang disosialisasikan kepada publik.

- k. Keturunan Quraisy, suku asal nabi Muhammad Saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi hanya didapati dalam beberapa hadis.⁴⁷

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus ditangani. Pemerintahan dalam islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi Negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat, Islam tidak membenarkan pemilikan asset kekayaan Negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah dimuka bumi.

Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang mengatakan siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan membawa kemaslahatan. Beberapa ahli juga mengartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Serta mengatur beberapa hal.⁴⁸ Adapun konsep keadilan dalam islam, yakni menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka dengan harus seadil-adilnya, memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai dengan Q.S.An-Nissa (4): 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa

⁴⁷ Muzar Ibnu khamami Zada...h, 248-263

⁴⁸ Imam Amrusi Jailani, et.al *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: lain sunan Ampel press, 2013), h.3

dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁹(Q.S.An-Nissa (4): 135)

Berdasarkan Ayat diatas hendak seseorang menyampaikan sesuatu berlandaskan keadilan dan penuh tanggung jawab sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fiqh siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktek yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, Muhammad setelah masa Nabi Muhammad SAW.

C. Pengertian Penangkaran Penyu

1. Pengertian penangkaran

Kata “penangkaran” sendiri merupakan padanan kata untuk kata asing *captive breeding* yang secara singkat dapat diartikan sebagai upaya pengembangbiakan satwa di dalam (in situ) atau diluar habitat aslinya (ex situ).

Penangkaran penyu pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan populasi penyu agar tidak punah (direktorat konservasi, 2009), dengan meningkatkan daya tahan tubuh penyu dari berbagai gangguan, termasuk penyakit, menjauhkan penyu atau tukik dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya (misal dari predator) dan meningkatkan daya tetas telur penyu (henneke, 2002). Oleh karena itu stasiun penangkaran penyu harus berada pada sekitar habitat

⁴⁹ Departmen Agama RI ...H. 79

peneluran penyu (sani,2000). Adapun lokasi penangkarnya adalah di pantai muara tembulih, tempat penangkaran yang masih bersifat alami.

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. penangkaran satwa liar berbentuk (Sumber: [Http://www.bksda-bali.com](http://www.bksda-bali.com). diakses pada 2 maret 2015).⁵⁰

- a. Pengembang biakan satwa,
- b. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam.
- c. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*artificial propagation*) dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional yang berkecimpung dalam pelestarian penyu di alam, yakni *International union for conservation of nature and natural resources* (IUCN), telah menetapkan criteria yang lebih rinci mengenai kondisi kelestarian penyu di dunia.

Berikut ini Sembilan kategori kelestarian penyu berdasarkan tingkat keterancaman spesiesnya yaitu:

1. Punah (*extinct*) : suatu jenis dikatakan punah jika dengan tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati.

⁵⁰“Pemahaman terhadap penangkaran penyu” (On-Line), tersedia di <https://sinta.Unud.ac.id/uploads/wisuda/091.htm> (09 Januari 2021)

2. Punah dialam (*extinct in the wild*) : suatu jenis dikatakan punah dialam jika dengan pasti diketahui bahwa jenis tersebut hanya hidup dipenangkaran atau hidup dialam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya.
 3. Kritis (*critically endangered*) : jenis penyu yang menghadapi resiko kepunahan yang tinggi di alam.
 4. Genting (*endangered*) : jenis penyu yang belum termasuk kategori kritis namun menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat.
 5. Rentan (*vulnerable*) : jenis penyu yang menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam.
 6. Keberadaanya tergantung aksi konservasi : jenis yang merupakan focus suatu program konservasi jenis atau habitat yang berakibat langsung terhadap kelestariannya.
 7. Resiko rendah, yaitu jenis yang di kategorikan tidak terancam punah.
 8. Kurang data : jenis ini masuk kedalam kelompok ntidak terancam punah.
 9. Tidak dievaluasi : jenis yang tidak dievaluasi seperti criteria diatas.
2. Pengertian Penyu dan Jenis-Jenis Penyu

Penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Reptil laut ini mampu bermigrasi dalam jarak yang sangat jauh disepanjang kawasan samudera hindia, samudera pasifik, dan asia tenggara. ⁵¹Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir ini bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari

⁵¹ Raden Ario, Edi Wibowo, Ibnu pratikto, ed. “*Pelestarian Habitat penyu dari ancaman kepunahan di Turtle Conservation And Education Center (TCEC)*”, (Department Ilmu Kelautan, Fakultas perikanan dan Ilmu kelautan, Universitas Diponegoro, Jurnal Kelautan Tropis Maret 2016), h. 60-66

hewan-hewan seperti kepiting, burung, dan reptil lainnya seperti biawak. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia, seperti juga halnya di seluruh dunia adalah manusia. Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang. Penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit dan cangkangnya telah membuat populasi penyu berkurang.⁵²

Dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, 6 diantaranya hidup diperairan Indonesia yaitu penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys olivacea*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), dan penyu pipih (*Natator depressus*).

a. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*)

Penyu belimbing adalah jenis penyu bertubuh besar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 180 cm dan beratnya sekitar 500 kg, penyu belimbing berwarna hitam dan memiliki bintik putih di sekujur tubuhnya. Sesuai namanya penyu ini memiliki cangkang seperti belimbing.⁵³ Tubuh besar penyu belimbing berlapis lemak tebal yang membantunya tetap hangat, lemak juga menahan panas yang dihasilkan oleh otot-otot ketika penyu belimbing berenang. Penyu belimbing dapat berenang ke perairan yang lebih dingin dibanding penyu lainnya mereka diketahui berenang jauh ke utara, ke Kanada dan Alaska. Penyu belimbing dewasa dapat ditemukan di laut sedingin 0°C.

Populasi Penyu belimbing saat ini sangat memprihatinkan, erosi dan perusakan pantai merupakan salah satu faktor yang berpengaruh

⁵² *Ibid.*, 67-68

⁵³ Christina Wilsdon, *Pengelolaan Konservasi Penyu* (Jakarta: PT Gramedia, 2017) h. 120

terhadap keberadaannya. Erosi akibat ganasnya gelombang laut dapat mengganggu penyebaran penyu belimbing di alam. Selain itu, menurunnya populasi penyu belimbing disebabkan oleh pemburuan secara ilegal dan eksploitasi telur yang tidak terkendali yang dilakukan oleh manusia, serta adanya parasit yang tumbuh di karapas penyu belimbing dapat mengganggu pertumbuhannya bahkan dapat menyebabkan kematian pada penyu ini.

Adapun klasifikasi belimbing (*Dermochelys coriacea*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordate

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia mydas*

a. Penyu hijau (*Chelonia mydas*)

Penyu hijau adalah penyu yang ukuran tubuhnya bervariasi, mulai dari 80 hingga 150 cm. beratnya bisa mencapai 132 kg. meskipun namanya penyu hijau tetapi warna aslinya kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Saat masih menjadi tukik, penyu hijau termasuk kedalam omnivore yang memakan hewan lain, seperti ubur-ubur. Mereka memakan ubur-ubur untuk membantu pertumbuhan tubuh mereka. Setelah dewasa penyu hijau berubah menjadi herbivore, jadi hanya memakan tumbuhan, seperti alga. Penyu hijau bisa

ditemukan di banyak tempat, mulai dari Afrika, India, Asia Tenggara, Mediterania, hingga pesisir Inggris. Penyu hijau setiap tahun ada 100.000 ekor penyu yang ditangkap di daerah Indo-Australia. Penyu yang ditangkap itu biasanya diawetkan dan dijadikan cinderamata.⁵⁴

Adapun klasifikasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia mydas*

b. Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*)

Penyu sisik adalah penyu yang seluruh permukaan tubuhnya terselimuti oleh sisik, dan sisiknya tumpang tindih warnanya bervariasi ada yang berwarna kuning, hitam dan coklat bersih. Penyu sisik ini selalu memilih kawasan yang gelap sunyi dan berpasi untuk bertelur. Ukuran penyu sisik bisa mencapai 100 cm dengan berat 127 kg. Penyu sisik memiliki moncong berkait, dan memakan spons, teripang, tunikata, anemone laut. Adapun klasifikasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordata

⁵⁴*Ibid.*, 122-123

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia mydas*

c. Penyu pipih (*Natator Depressusi*)

Penyu pipih adalah salah satu penyu yang dapat ditemukan di perairan Indonesia. Penyu ini menyukai perairan laut dangkal yang jauh dari area terumbu karang. Mereka jarang sekali meninggalkan wilayah perairan dangkal dan hanya bersarang di wilayah utara Australia. Perilakunya sangat berbeda dibandingkan dengan spesies penyu lainnya, penyu pipih memiliki ciri karapasnya berwarna kelabu berbentuk pipih atau rata, hanya sedikit melengkung di sisi luarnya. Penyu pipih juga termasuk hewan omnivore makanan utamanya lamun, karang lunak, teripang, ubur-ubur, kerang, udang dan lain-lain.

Adapun klasifikasi penyu lekang (*Natator Depressusi*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordate

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia mydas*

d. Penyu tempayan (*Caretta-caretta*)

Penyu tempayan adalah penyu terbesar kedua setelah penyu belimbing, ukuran tubuhnya bisa lebih dari 90 cm dan beratnya sekitar 70-200 kg. Kulit penyu jenis ini berwarna kuning kecoklatan, sedangkan tempurungnya berwarna merah kecoklatan. Mereka juga memiliki kepala yang kuat, jika dibandingkan dengan penyu lain. Penyu tempayan termasuk omnivore jadi miasa memakan keong, kerang, udang, kerang-kerangan dll.

Adapun klasifikasi penyu lekang (*caretta-caretta*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordate

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia myda*

e. Penyu lekang (*lepidochelys olivacea*)

Penyu lekang adalah termasuk penyu terkecil dengan berat 31-43 kg dan memiliki warna kerapasnya abu-abu kehijauan dikenal dengan nama *olive ridley sea turtle* atau penyu belimbing pasifik. Tubuhnya bisa tumbuh antara 60 hingga

70 cm dan beratnya bisa mencapai 50 kg. penyu ini termasuk herbivora karena biasanya memangsa invertebrata, ubur-ubur, uruochordata, bivalvia (kerang-kerangan dll).

Adapun klasifikasi penyu lekang (*lepidochelys olivacea*) sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudines

Family : Chelonia

Genus : *Lepidochelys*

Spesies : *Chelonia mydas*

3. Karakteristik Bio-fisik Tempat peneluran penyu

Daerah peneluran sebagai tempat bertelur bagi penyu laut, mempunyai segi karakteristik setiap jenis penyu. Pantai yang berpasir tidak semuanya digunakan untuk bertelur, tetapi dipilih oleh penyu dan sesuai dengan karakter yang diinginkan untuk dijadikan sebagai pantai tempat peneluran. Penyu memerlukan tempat lingkungan yang memiliki factor lingkungan bio-fisik yang baik dan sesuai untuk dijadikan sebagai peneluran penyu.⁵⁵

a. Kelembapan pasir

Kelembapan pasir merupakan factor penting dalam pertumbuhan embrio dan penetasan telur. Pasir yang sesuai dengan kelembapan yang

⁵⁵Alfi Satriadi., "Identifikasi Penyu dan Studi Karakteristik", (Jurnal Ilmu Kelautan, 2003), h. 69.

tepat mampu menyangga bentuk ruang pada telur. Oleh karena itu, induk lebih memilih tempat dengan kelembapan yang tepat.⁵⁶ Dilingkungan yang memiliki kelembapan yang rendah atau terlalu kering mengakibatkan persentase kematian lebih tinggi, karena telur penyu sangat sensitive dengan kekeringan. persentase menetas lebih tinggi di daerah pasir pantai yang dekat dengan daratan dibandingkan dengan daerah pasir pantai yang dekat dengan laut (80%:37%).

b. Suhu pasir

Suhu pasir sarang merupakan perpaduan antara suhu lingkungan dengan suhu telur selama inkubasi. Perkembangan secara teratur dan bertahap pada batas-batas suhu 25-35 akan menghasilkan laju tetas yang baik dan waktu pengeraman yang relative singkat. Suhu 22-23 merupakan batas normal untuk Embrionik.⁵⁷ Suhu yang diperlukan agar embrio berkembang dengan baik adalah 24-33 bila suhu dalam dari 29 sarang diluar batas suhu tersebut penetasan juga mempengaruhi jenis kelamin tukik yang akan menetas. Bila suhu kurang dari 29 maka sebagian besar adalah tukik jantan, sebaliknya jika suhu lebih dari 29 maka sebagian besar adalah tukik betina. Suhu sarang sangat menentukan lamanya penetasan dan proses diferensiasi gonad tukik. Penentuan jenis kelamin pada penyu tidak dipengaruhi oleh kromosom seks, namun dipengaruhi oleh suhu lingkungan pada saat pengeraman mekanisme fisiologi temperature dalam mempengaruhi jenis kelamin tukik. Terjadi akibat

⁵⁶ Bima Anggara Putra, "Studi karakteristik Biofisik Habitat peneluran penyu Hijau (*Chelonia mydas*)", (*Journal of Marine Research* 2014), h. 178.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 180

adanya kerja enzim aromatase pada organ gonad. Enzim aromatase bekerja mengubah hormone androgenn menjadi hormone estrogen. Semakin tinggi suhu, semakin banyak jumlah enzim aromatase yang dihasilkan, produksi hormone estrogen juga akan meningkat, peningkatan hormone estrogen akan membentuk tukik berjenis kelamin betina, begitu pula sebaliknya.

c. Struktur pasir

Pasir merupakan tempat yang mutlak diperlakukan untuk penyu bertelur. Semua jenis penyu akan memilih daerah tempat bertelur yang sesuai dan aman, tekstur berhubungan dengan tingkat kemudahan penyu dalam menggali sarang, pasir pantai harus memiliki ukuran butir yang sesuai untuk mempermudah sarang dalam konstruksi serta mampu memfasilitasi difusi udara agar telur dapat tumbuh dengan baik.

d. Lebar pantai

Lebar pantai tempat peneluran penyu berkisar 30-80 m lebar pantai yang tinggi menyebabkan sarang yang dibuat oleh penyu agak menjauh dari batas pasang tertinggi. Meskipun ada lebar pantai yang kurang dari 30m namun pada kenyatannya gelombang air laut pada saat pasang tidak sampai menggenangi daerah tempat sarang penyu sehingga telur akan tetap aman. Jarak sarang yang terlalu dekat dengan air laut akan menjauhkan sarang penyu dari rendaman air laut.

4. Kemiringan pantai

Penyu pada saat bertelur cenderung memilih pantai yang landai dan luas yang terletak di atas bagian pantai dengan kemiringan 30°. Selain itu, semakin curam pantai maka akan semakin besar pula energi penyu yang diperlukan naik bertelur, dan semakin sulit penyu melihat objek yang berada jauh depan, karena mata penyu hanya mampu berakomodasi dan melihat dengan baik pada sudut 150° kebawah.

a. Vegetasi tumbuhan

Keberadaan vegetasi di pantai sangat penting bagi sarang peneluran penyu untuk inkubasi telur. Sarang peneluran penyu sering kali ditemukan dibawah naungan vegetasi pantai, vegetasi dianggap menambah keamanan untuk meletakkan telur-telurnya agar terhindar dari predator.⁵⁸ Keberadaan vegetasi tumbuhan mempengaruhi masa inkubasi telur penyu yang berada didalam sarang. Masa inkubasi pada lahan yang terbuka memiliki rata-rata inkubasi lebih singkat yaitu selama 48 hari dibandingkan dengan masa inkubasi pada lahan yang tertutupi oleh vegetasi dengan rata-rata inkubasi lebih lama yakni 50-52 hari vegetasi pantai secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan penyu untuk bertelur dikarenakan akar vegetasi yang dapat mengikat butiran pasir dan menghindari terjadinya keruntuhan pasir sehingga akan dapat mempermudah penyu dalam melakukan penggalian dan proses penelurannya.

⁵⁸ Aditya Dwi Nugroho, "studi karakteristik". (*Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil penelitian perikanan dan kelautan ke-IV 422 Fakultas perikanan dan Ilmu kelautan* November 2016), h. 431

Kehadiran hutan-hutan yang lebat memberikan pengaruh yang baik terhadap kestabilan populasi penyu yang bertelur. Jika pohon-pohon tumbuh dengan lebat maka daun-daun yang jatuh lama kelamaan mengalami proses dekomposisi menjadi partikel-partikel mineral dan langsung hanyut terbawa air ke laut. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga kesuburan perairan dapat tetap terjamin. Kesuburan perairan menjadi kebutuhan biota yang hidup di daerah tersebut, seperti tumbuhnya rumput laut dan tersedianya invertebrate laut berupa zooplankton, dimana invertebrate laut merupakan makanan yang dibutuhkan oleh populasi penyu yang masih tukik.

b. Hewan predator

Predator merupakan ancaman terhadap telur penyu, tukik atau penyu dewasa, penyu yang baru menetas umumnya menghadapi ancaman kematian dari berbagai aspek diantaranya hewan predator dan masyarakat. Hewan-hewan predator terhadap penyu seperti kepiting, semut, burung, dan reptilian lainnya biawak yang dijadikan sebagai makanan sedangkan ancaman masyarakat yaitu aktivitas manusia seperti melakukan pembangunan daerah pasir.

Penyu merupakan salah satu hewan yang tingkat populasinya kian menurun tiap tahunnya. Padahal menurunnya populasi penyupun dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, saat ini semua jenis penyu termasuk dalam kategori *threatened spesies*) dan dimasukkan dalam daftar merah IUCN yang berarti terancam punah. Beberapa jenis yang bertelur di pesisir perairan di

Indonesia yang berstatus *criticallyendangered* penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang dan penyu belimbing.

Penyu berperan dalam menjaga stabilitas habitat laamun dan menyebarkan nutrisi di perairan, termasuk menunjang kelimpahan keragaman ikan yang menjadi sumber protein bagi manusia. Peyu adalah predator yang penting dalam jaringan dan rantai makanan di laut. Seekor penyu betina menghasilkan ratusan butir telur, hanya belasan tukik (bayi penyu) berhasil sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa.

5. Undang-undang tentang perkembang Biakan penyu

Perlindungan penyu laut di Indonesia dilakukan sejak tahun 1978 dengan di keluarkannya surat keputusan menteri pertanian nomor 327/ kpts /um/5/1978 tentang status proteksi untuk penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Atau Dua tahun setelah itu, menteri pertanian kembali mengeluarkan surat keputusan nomor 716/kpts/-10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu laut yaitu penyu lekang atau sisik semu (*lepidochelys olivacea*) dan penyu bromo (*caretta-caretta*). pada tahun 1990 dikeluarkan undang-undang (UU) nomor 5/1990 tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemny. Bagian yang relevan untuk perlindungan penyu laut adalah pasal 21 ayat 2 dan dan pasal 40 ayat 2 pada pasal 21 (2), setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

- b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah (pp) Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.⁵⁹ Hal ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya itu dilarang, sedangkan menurut undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu dapat dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. Kementerian dalam negeri juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan penyu dengan mengeluarkan surat edaran mendagri Nomor 523.3/5228/SJ/2011 tanggal 29 desember 2011 tentang

⁵⁹Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

pengelolaan penyu dan habitatnya, yang mengintruksikan kepada para gubernur untuk selanjutnya mengkoordinasikan kepada para bupati dan walikota serta instansi terkait di wilayahnya untuk melindungi penyu melalui tindakan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum dan penindakan serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait sekaligus pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu. Selain itu kementerian kelautan dan perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunnya juga telah menerbitkan surat edaran No. SE 526 Tahun 2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh dan produk turunannya.

6. Al-Quran dan hadist tentang hewan laut

a) Qs.Ar-Ruum (30) : 41

Didalam surah Ar-Ruum ayat 41 Allah SWT memperingatkan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(QS.Ar-Ruum Ayat 41)

2. Qs. An-Nahl (16) : 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Undang-undang NO 32 Tahun 2014 Tentang Kementerian Kelautan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Buku

Al-ZuhayliWahbah, *UshulFiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr,2001), h.18

ArikuntoSuharsimi, *ProsedurPenelitian*, Jakarta: RinekaCiptaRevisi, 1996

AgusBustanudiAl-Islam *Buku pedoman kuliah untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993

Amrusi Jailani Imam *Hukum Tata Negara Islam*Surabaya: lain sunan Ampel press, 2013

Brannen Julia, *MemaduMetodePenelitianKualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2005

bin Muhammad Ali al-Mawardi, *al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kurub al-Alamiyyah, 2006

GootSchalk Louis, *Understanding Story, A. Primer OfHistirical*, TerjemahanNugrohoNotosusanto UI Press, 1995

Hasyimi. A, *dimana letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bima Ilmu, 1984

Iqbal Muhamad, *FIqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranada media Group, 2014

Ibnu Syarif Mugar, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran politik Islam* Jakarta:PT. Geora Aksara pratama, 2008

Ibrahim Hasan, *sejarah kebudayaan Islam*, Jakarta: kalam mulia, 2003

Iskandar Al-BarsanyNoer, *kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)*, Jakarta:Rajawali, 1993

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 21

Muin Abd Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik Dalam Alqur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995

- Muhammad Abdurkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt.Cira Aditya Bakti, 2004
- Musthafa Al-Maraghi Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, penerjemah: Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra Semarang, 1986
- Suyuthi, M.A Pulungan *Fiqh Siyasah: Ajaran sejarah dan pemikiran.*: Yogyakarta, Ombak. 2014
- Syariati Ali, *Ummah Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Auntenisitas Ideologi dan Agama*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012
- orobuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja wali Pers, 2012
- Subagyo P Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Melton Putra, 2011
- Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.115
- Syafi'ie kencana Inu, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5
- Szadjali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan pemikiran* Jakarta Ulpres, 1993
- Tahir Azhari Muhammad, *Negara hukum "suatu study tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada periode madinah dan masa kini*, Bogor. Kencana, 2003
- Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008
- Wahab Khallaf Abdul, *Al-Siyasah al-syar'iyah*, kairo: Dar al-Anshar, 1977
- Wilsdon Cristian, *Pengelolaan Konsevasi Penyus* Jakarta: PT Gramedia, 2017

Jurnal

- Ario Raden, Pelestarian Habitat Penyus Dari Ancaman Kepunahan, Department Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan Dan Kelautan, Universitas Diponegoro, *Jurnal Kelautan Tropis* Maret 2016
- Agustina Rina, Perubahan Garis Pantai Terhadap Habitat Bertelur Penyus. Alumni Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Unpad, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*
- Anggara Putra Bima, Studi karakteristik Biofisik Habitat peneluran penyus Hijau (*Chelonia mydas*), *Journal of Marine Research* 2014¹

Dwi NugrohoAditia, studi karakteristik, *Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil penelitian perikanan dan kelautan ke-IV 422 Fakultas perikanan dan Ilmu kelautan* November 2016

SatriadiAlfi.,Identifikasi Penyu dan Studi Karakteristik :*Jurnal Ilmu Kelautan*, 2003

Sumber Online

Anonim, “Pengelolaan Penyu Di Indonesia” (On-Line), Tersedia di: <http://www.menlh.go.id/can.contendanvieartikel> (12 Oktober 2020)

PelayananPublik “ ApaItuKabupatenPesisir Barat ” (On-Line), tersedia di: <https://pesisirbaratkab.go.id/> (15 Oktober 2020)

Pemahaman terhadap penangkaran penyu” (On-Line), tersedia di <https://sinta.Unud.ac.id/uploads/wisuda/091.htm> (09 Januari 2021)

